

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung dalam periode waktu tertentu. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh apabila kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung pada kenaikan output barang dan jasa, serta kegiatan ini juga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan nasional (Sri Hartati, 2021).

Menurut Firmasnyah (2021) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang keadaan perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Melalui kegiatan ekonomi tersebut masyarakat akan memperoleh pendapatan dan itu akan berdampak pada peningkatan taraf hidup (Erdkhadifa, 2022).

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai tolak ukur makro dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah dijadikan sebagai indikator pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masing-masing masyarakat. Pembangunan perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab pembangunan suatu negara diukur dari kemakmuran, keamanan, dan kualitas sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia dan lingkungan hidup. (Somba dkk., 2021). Pertumbuhan ekonomi di

Indonesia salah satunya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adapun PDRB di setiap wilayah Indonesia dapat dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia Tahun 2017-2021
(Milyar Rupiah)

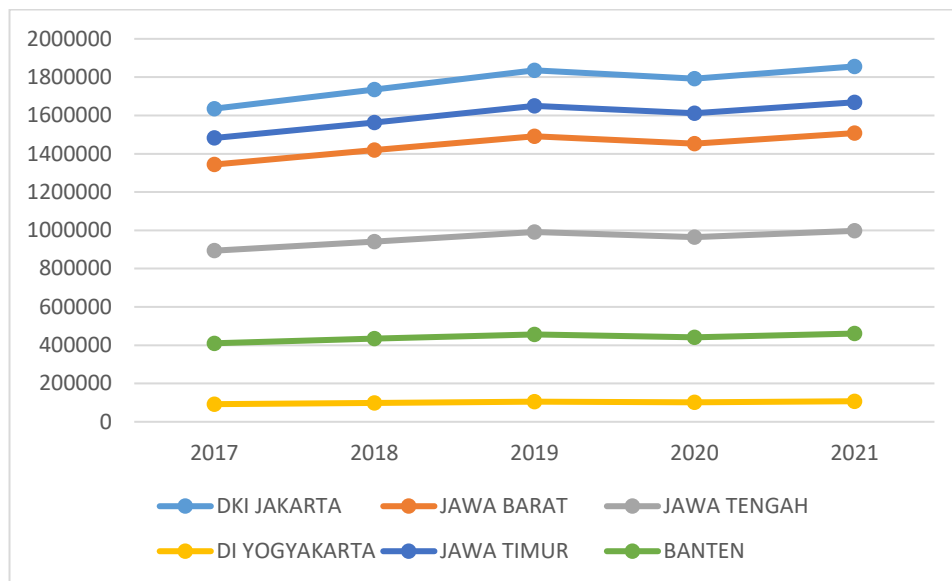
Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	121240.98	126824.37	132069.62	131580.97	135251.19
SUMATERA UTARA	487531.23	512762.63	539513.85	533746.36	547651.82
SUMATERA BARAT	155984.36	163996.19	172205.57	169426.61	175000.5
RIAU	470983.51	482064.63	495607.05	489995.75	506471.91
JAMBI	136501.71	142902	149111.09	148354.25	153825.49
SUMATERA SELATAN	281571.01	298484.07	315464.75	315129.22	326411.27
BENGKULU	42073.52	44164.11	46345.45	46338.43	47853.78
LAMPUNG	220626.1	232165.99	244378.31	240319.59	246966.49
KEP. BANGKA BELITUNG	49985.15	52208.04	53941.9	52705.94	55369.65
KEP. RIAU	166081.68	173498.75	181877.67	174959.21	180952.44
DKI JAKARTA	1635359.2	1735208.3	1836240.6	1792291.1	1856075.8
JAWA BARAT	1343662.1	1419624.1	1490959.7	1453380.7	1507746.4
JAWA TENGAH	893750.3	941091.14	991516.54	965227.27	997345.05
DI YOGYAKARTA	92300.24	98024.01	104485.46	101698.52	107372.56
JAWA TIMUR	1482299.6	1563441.8	1649895.6	1611392.6	1668749.4
BANTEN	410137	433782.71	456620.03	441148.58	460963.02
BALI	144933.31	154072.66	162693.36	147498.94	143864.97
NUSA TENGGARA BARAT	94608.21	90349.13	93872.44	93288.87	95437.86
NUSA TENGGARA TIMUR	62725.41	65929.19	69389.02	68809.61	70540.66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	124289.17	130596.32	137243.09	134743.38	141212.04
KALIMANTAN TENGAH	89544.9	94566.25	100349.29	98933.61	102481.47
KALIMANTAN SELATAN	121858.52	128052.58	133283.85	130864.32	135422.59
KALIMANTAN TIMUR	452741.91	464694.43	486523.18	472393.33	484438.88
KALIMANTAN UTARA	54537.31	57459.31	61417.79	60746.21	63162.97
SULAWESI UTARA	79484.03	84249.72	89009.26	88126.37	91790.93
SULAWESI TENGAH	97474.86	117555.83	127935.06	134152.69	149848.82
SULAWESI SELATAN	288814.17	309156.19	330506.38	328154.57	343395.41
SULAWESI TENGGARA	83001.69	88310.05	94053.52	93445.72	97276.36
GORONTALO	25090.13	26719.27	28429.97	28425.38	29110.05
SULAWESI BARAT	29282.49	31114.14	32843.81	32074.02	32898.23
MALUKU	27814.05	29457.13	31049.45	30765.89	31702.75
MALUKU UTARA	23210.86	25034.08	26597.55	28031.44	32739.16
PAPUA BARAT	56907.96	60465.52	62074.52	61604.13	61289.4
PAPUA	148818.29	159711.85	134565.89	137787.29	158674.3
INDONESIA	9912928.1	10425852	10949155	10722999	11120078

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (data diolah)

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa PDRB di Indonesia dari tahun 2017-2021 ini mengalami fluktuasi. Dimana hampir seluruh daerah di Indonesia tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang cukup baik, akan tetapi pada tahun 2020 sebagian besar seluruh wilayah tersebut mengalami penurunan hal ini diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian di Indonesia ini tidak berjalan, sehingga membuat PDRB di wilayah Indonesia mengalami penurunan dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia dengan luas sekitar 126.700 km persegi yang terbagi kedalam enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Pulau Jawa ini merupakan sentral dari pemerintahan Indonesia. Selain itu, pembangunan di Indonesia sempat terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa saja, hal ini menyebabkan pembangunan yang berada di Pulau Jawa ini cenderung lebih lebih cepat. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan ini menyebabkan Pulau Jawa menjadi pulau yang maju dibandingkan dengan pulau lain dikarenakan sudah ada berbagai macam fasilitas dan tidaklah heran daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa ini cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ditopang paling besar dari PDRB Pulau Jawa (Erdkhadifa, 2022). Adapun data pertumbuhan ekonomi daerah Pulau Jawa adalah sebagai berikut.



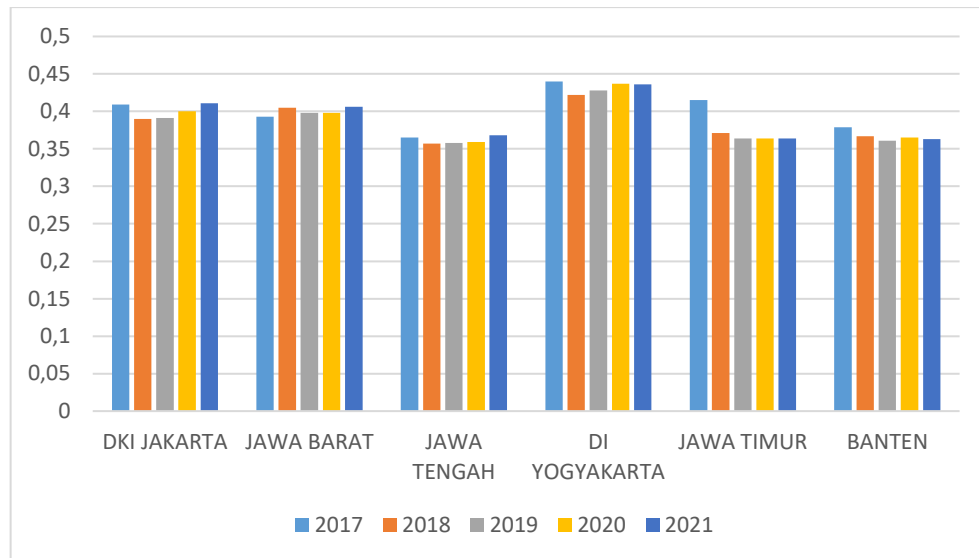
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (data diolah)

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto di daerah Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa PDRB di daerah Pulau Jawa pada tahun 2017-2021 ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019 seluruh daerah tersebut mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan.

Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa ini tinggi, tetapi dengan pembangunan yang terjadi cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa banyak yang memilih untuk meninggalkan daerahnya dan berpindah ke Pulau Jawa, hal ini tidak lebih karena mereka menginginkan kehidupan yang layak. Dengan banyaknya masyarakat yang berpindah ke Pulau Jawa ini menyebabkan kesempatan kerja menjadi kecil, hal ini tentu mempengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan

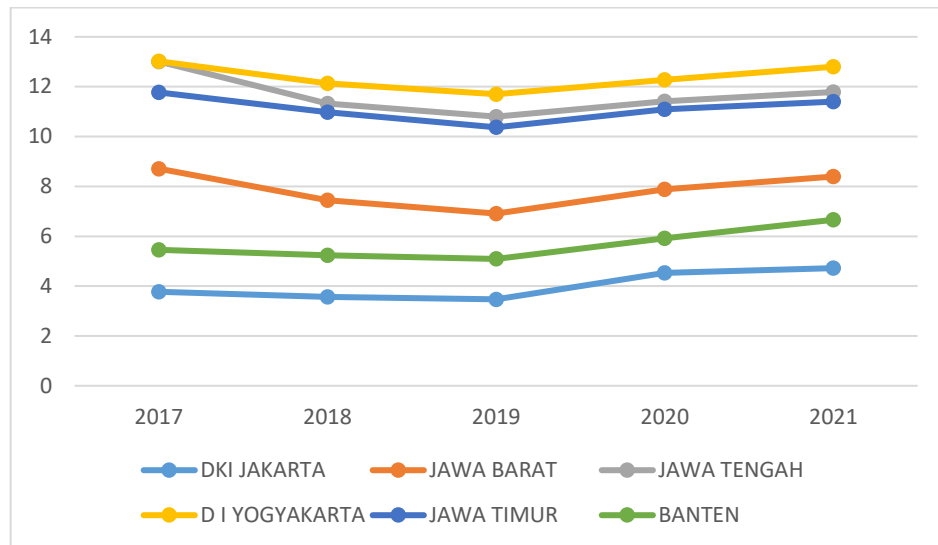
pendapatan di Pulau Jawa. Adapun tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Pulau Jawa adalah sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 (data diolah)

Gambar 1.2 Gini Ratio Daerah Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Persen)

Berdasarkan dari gambar 1.2 *gini ratio* di daerah Pulau Jawa pada tahun 2017-2021 termasuk ke dalam kategori tinggi. Dimana pada tahun 2018 hampir seluruh daerah mengalami penurunan kecuali Jawa Barat yang justru meningkat. Sedangkan pada tahun 2021 hanya D.I Yogyakarta yang mengalami penurunan dan sisanya ada yang tetap serta ada juga yang meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (data diolah)

**Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin di Daerah Pulau Jawa
Tahun 2017-2021 (Persen)**

Dari gambar 1.3 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di daerah Pulau Jawa ini mengalami fluktuasi dan terbilang masih tinggi. Dari tahun 2017 sampai 2019 hampir seluruh daerah mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2020 dan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian seluruh daerah mengalami penurunan.

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi ini sudah bukan lagi menjadi acuan untuk dalam pembangunan suatu negara, karena tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibarengi dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tidak berkurang menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi daerah belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pada saat

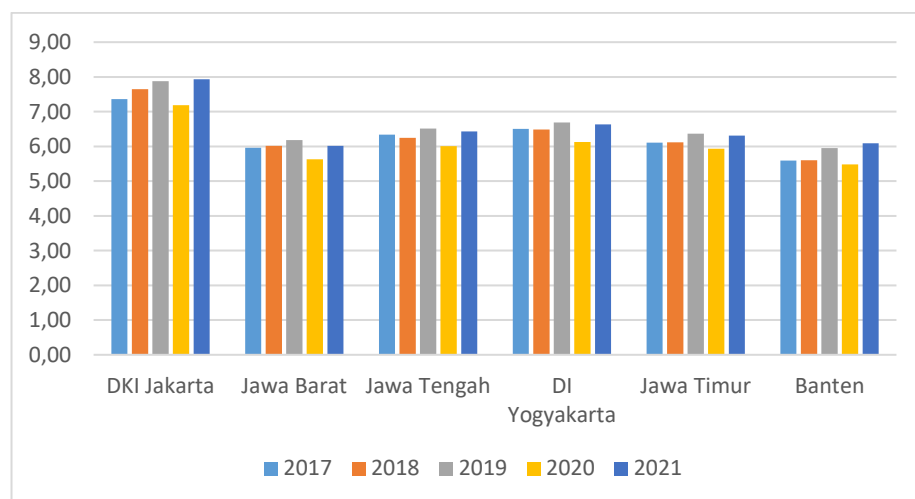
ini yang menjadi tujuan utama suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini tidak hanya mencakup tentang peningkatan PDB saja, tetapi meliputi kemiskinan dan ketimpangan serta menciptakan akses dan peluang.

Pertumbuhan inklusif ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kedelapan: peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dengan mencapai pertumbuhan inklusif, maka diharapkan juga akan mencapai tujuan SDGs lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan di dalam dan antar negara. Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif penting untuk mencapai target SDGs tahun 2030 (Ji Long & Pasaribu, 2020)

World Bank mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang adil dan mampu menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, konsumsi dan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin (Klasen, 2017). Pertumbuhan ekonomi inklusif mendorong setiap orang untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan komponen lain yang mendukung taraf hidup yang lebih baik (Kristyanto & Kaluge, 2018).

Pertumbuhan inklusif tidaklah sama dengan pertumbuhan yang *pro poor* (*pro poor growth*). Hal ini karena pertumbuhan *pro poor* hanya mencakup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan pertumbuhan inklusif lebih

bersifat umum dan mencakup kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, berpendapatan menengah, serta kelompok kaya karena pertumbuhanlah yang memberikan manfaat bagi seluruh segmen masyarakat (Ji Long & Pasaribu, 2020). Inklusivitas dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif terbagi menjadi tiga komponen utama, dimensi-dimensi tersebut terdiri dari dimensi pertumbuhan ekonomi sebagai pilar pertama, dimensi ketimpangan dan kemiskinan sebagai pilar kedua, serta dimensi akses dan peluang sebagai pilar ketiga. Pembangunan ekonomi diukur dari kegiatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2023 (data diolah)

Gambar 1.4 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Daerah Pulau Jawa Tahun 2017-2021

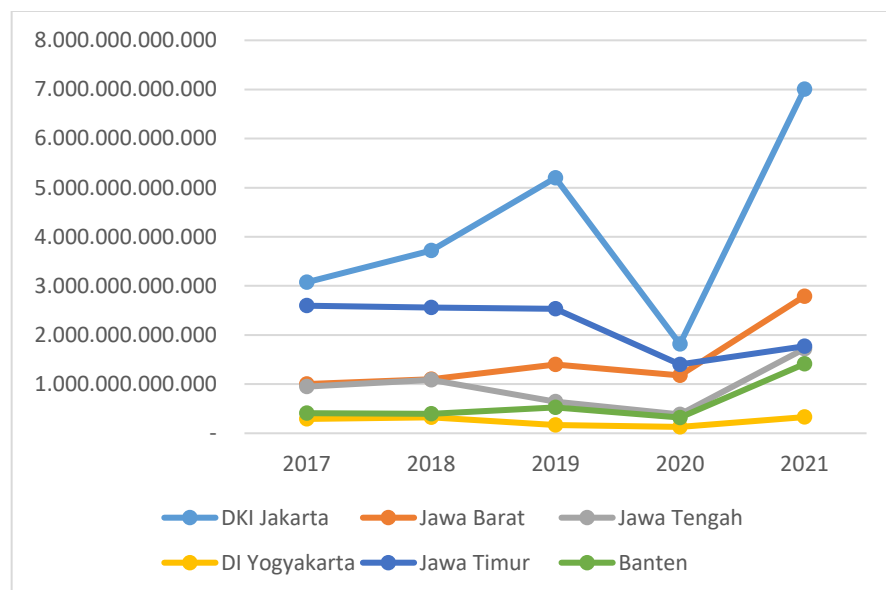
Berdasarkan dari data yang diperoleh pada gambar 1.4 indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di enam provinsi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019 hampir rata-rata mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat seluruh

kegiatan ekonomi di dunia mati, tak terkecuali Indonesia dan tahun 2021 ke-enam provinsi ini mengalami peningkatan kembali. Walaupun demikian, angka tersebut tergolong dalam kategori yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi inklusif daerah secara menyeluruh tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah kekuasaan kontrol dan persiapan perencanaan ekonomi sesuai dengan situasi dan kebutuhan penduduk di daerah tersebut. Kapasitas fiskal daerah terus diperkuat untuk mengatasi tantangan sosial ekonomi baik secara nasional maupun regional. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengalokasikan anggaran, termasuk pengeluaran pemerintah, untuk memastikan bahwa program pembangunan ekonomi yang telah disiapkan dilaksanakan untuk menjamin pembangunan ekonomi daerah yang optimal dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (Sihombing & Purwanti, 2022).

Kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak pada permasalahan pembangunan yang terjadi, namun juga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kebijakan Indonesia adalah kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia khususnya belanja pemerintah melalui belanja sektor ekonomi, agar dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sehingga mengarah pada pemerataan pembangunan. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, jumlah tenaga kerja produktif juga penting dalam mendukung pembangunan sebab peningkatan angkatan kerja produktif juga dapat meningkatkan output perekonomian. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan hadirnya sarana dan prasarana yang

mendukung, baik dengan kebijakan atau lainnya. Sehingga peningkatan angkatan kerja produktif atau orang-orang yang biasanya menjadi bagian dari angkatan kerja dapat terserap dalam peluang kerja yang lebih tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui realisasi inklusif (Sri Hartati, 2021). Adapun pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi di daerah Pulau Jawa adalah sebagai berikut.



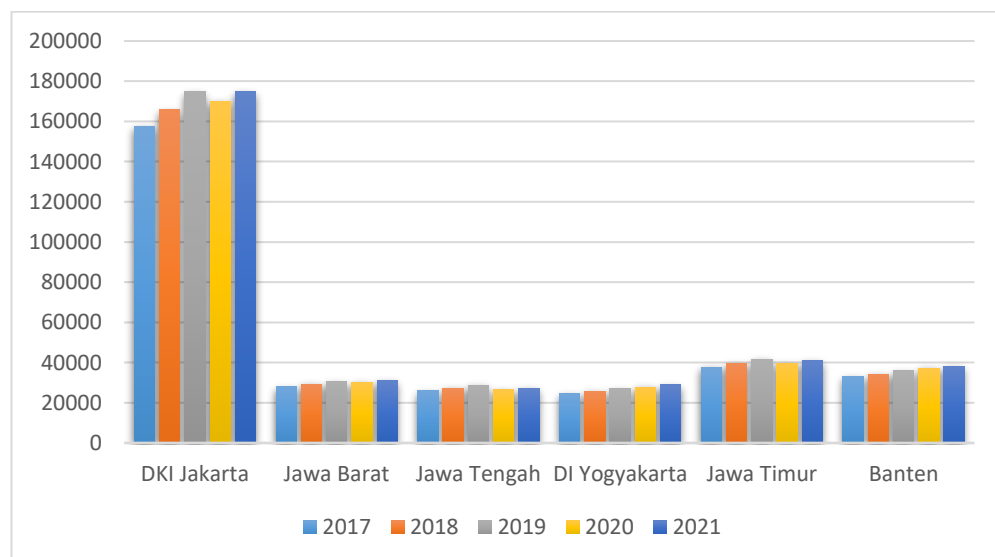
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2023 (data diolah)

Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi di Daerah Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Berdasarkan dari gambar 1.5 dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Namun pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi D.I Yogyakarta ini memiliki nilai yang paling kecil, sedangkan yang tertinggi yaitu DKI Jakarta. Bahkan pada tahun 2021 DKI Jakarta

ini mencapai angka Rp. 7.000.000.000.000 dan termasuk pengeluaran ini merupakan yang sangat tinggi.

Pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai peningkatan pendapatan per kapita, hal ini dikarenakan peningkatan tersebut dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun ada juga faktor non-ekonomi lain yang menentukannya. Pendapatan per kapita seringkali menjadi ukuran kemakmuran suatu negara atau wilayah. Ketika pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga permintaan terhadap barang pun meningkat. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber pendapatan daerah tersebut sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah tersebut (Sari, 2022). Pendapatan per kapita di daerah Pulau Jawa pada tahun 2017-2021 dideskripsikan pada gambar 1.6.

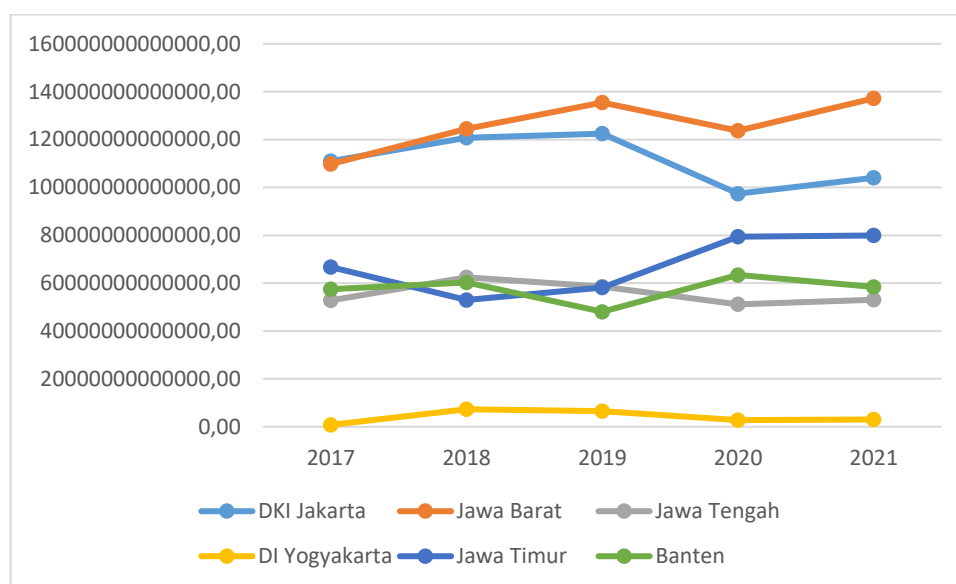


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (data diolah)

**Gambar 1.6 Pendapatan Per Kapita di Daerah Pulau Jawa
Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)**

Berdasarkan dari gambar 1.6 pendapatan per kapita daerah Pulau Jawa tahun 2017-2021 ini mengalami fluktuasi. D.I Yogyakarta dan Banten merupakan daerah yang mengalami peningkatan pendapatan per kapita di setiap tahunnya. Sedangkan daerah lainnya di tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19. Untuk daerah yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi yaitu DKI Jakarta bahkan dalam empat tahun terakhir berada di atas angka 160000 dan daerah yang memiliki pendapatan per kapita terkecil adalah D.I Yogyakarta.

Selain pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi dan pendapatan per kapita, faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif lainnya yaitu dengan adanya investasi. Menurut Todaro (2000: 137-138) menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Distribusi modal meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembangunan ekonomi memerlukan sumber daya yang besar, namun setiap daerah mempunyai sumber daya yang terbatas, sehingga kekurangan tersebut harus dipenuhi dengan masuknya modal masuk dan dana negara dan sumber lainnya (Nehemia & Prasetya, 2023). Berikut adalah realisasi investasi di daerah Pulau Jawa pada tahun 2017-2021.



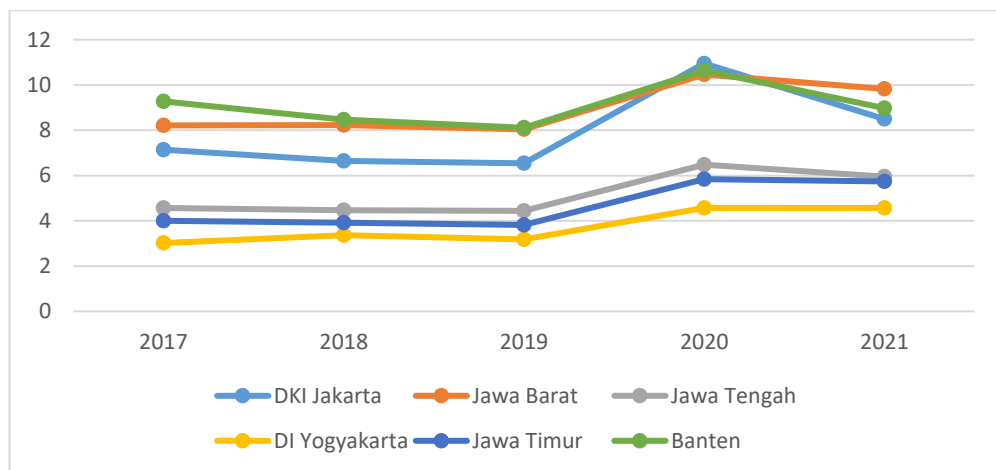
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (data diolah)

Gambar 1.7 Investasi di daerah Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Gambar 1.7 menjelaskan bahwa investasi di daerah Pulau Jawa pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 seluruh daerah mengalami peningkatan investasi kecuali Jawa Timur yang mengalami penurunan, pada tahun 2020 dimana terjadi pandemi covid-19 hanya daerah Jawa Timur dan Banten yang mengalami peningkatan sedangkan daerah lainnya itu mengalami penurunan. Nilai investasi tertinggi itu Jawa Barat dan nilai investasi terendah yaitu D.I Yogyakarta.

Selanjutnya tingkat pengangguran juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif. Pengangguran merupakan masalah bagi semua negara di dunia, dimana tingkat pengangguran yang tinggi mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, negara-negara berusaha mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang sesuai. Pengangguran selalu menjadi masalah yang sulit dipecahkan di negara mana pun. Seiring bertambahnya jumlah penduduk

dari tahun ke tahun, jumlah pencari kerja juga meningkat dan jumlah penduduk yang bekerja pun meningkat. Apabila seorang pekerja tidak dapat menerima pekerjaan, ia digolongkan sebagai pengangguran (Tul Ramadani dkk, 2021). Berikut data tingkat pengangguran terbuka di daerah Pulau Jawa tahun 2017-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (data diolah)

Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah Pulau Jawa Tahun 2017-2021 (Persen)

Berdasarkan dari gambar 1.8 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di daerah Pulau Jawa ini mengalami fluktuasi. Di tahun 2020 seluruh daerah di Pulau Jawa ini mengalami peningkatan yang signifikan, ada pula daerah yang mencapai angka 10%. Bahkan DKI Jakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena pada tahun sebelumnya berada di bawah angka 8%. Kemudian di tahun 2021 seluruh daerah Pulau Jawa mengalami penurunan. Akan tetapi, DI Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Jawa.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita, investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah Pulau Jawa pada tahun 2013-2021.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka indentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita, investasi dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Jawa pada tahun 2013-2021?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita, investasi dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Jawa pada tahun 2013-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita, investasi dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Jawa pada tahun 2013-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendapatan per kapita, investasi dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Jawa pada tahun 2013-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan atau referensi dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kebijakan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tingkat baru yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif serta mewujudkan tujuan SDGs tujuan yang kedelapan.
2. Bagi akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.
3. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat bahwasannya pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya tentang GDP meningkat saja tetapi juga tentang kesetaraan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011: 52) lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya proses penelitian untuk mencari pemecahan masalah penelitian (Insani dkk., 2023). Lokasi dalam penelitian ini adalah Pulau Jawa yang terbagi ke dalam enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2023 – 2024																							
	Septem-ber				Oktober				Novem-ber				Desem-ber				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyerahan Sk Dan Pengajuan Judul		■																						
Pengesahan Judul			■																					
Pengumpulan Data		■	■																					
Penyusunan Proposal Skripsi dan Bimbingan				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar Proposal Skripsi													■											

